

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar murid secara aktif dapat mengembangkan potensi pada dirinya untuk dapat memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Maka dari itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik. Kebijakan pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Salah satu bentuk janji pemerintah itu tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dan menjalankan seluruh proses pendidikan dengan transparan dan akuntabel yang harus dikelola dengan baik dan bertanggungjawab guna menjaga kepercayaan publik. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2

menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh murid pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lainnya.

Mengingat sangat pentingnya pendidikan, maka seluruh komponen pendidikan seperti kurikulum, guru, murid, sarana sekolah dan fasilitas sekolah menjadi sangat strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Mengenai masalah mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai *input*, seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Untuk menjalankan pendidikan dengan berbagai komponen tersebut dibutuhkan manajemen sebagai pengarah sekaligus penggerak dalam menjalankan pendidikan. Sementara mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai atau hasil yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan akan meningkat, jika dalam proses pembelajaran didukung dengan guru yang berkualitas, serta ditunjang berbagai sarana prasarana pendidikan. Maka dari itu, terwujudnya kompetensi murid juga tidak lepas dari

besarnya anggaran pendidikan yang tersedia.

Bantuan Operasional Sekolah pada dasarnya merupakan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu biaya pendidikan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan serta peningkatan mutu. Dana BOS diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan meningkatkan beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu. Kehadiran dana BOS diharapkan dapat mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua murid, dan bahkan jika dimungkinkan agar murid miskin dapat mendapatkan pendidikan secara gratis atau setidaknya dapat bersekolah dan menyelesaikan pendidikan dasar.

Adanya program dana BOS menuntut setiap sekolah agar dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta bertanggung jawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pendanaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Pengelolaan dana BOS haruslah disesuaikan dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kepala sekolah selaku penanggungjawab pengelolaan dana BOS di sekolah mempunyai peran yang besar untuk mengatur alokasi pendanaan untuk operasional sekolah.

Adanya kebijakan pemerintah melalui penyaluran dana BOS bukan berarti berhentinya permasalahan pada pendidikan, namun memunculkan masalah baru terkait dengan penyelewengan, dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Berkaitan dengan ketidakefektifan penggunaan dana BOS, hasil penelitian Fitri

(2014) menunjukkan bahwa masih ada juga sekolah yang kurang transparansi dan tidak melibatkan komite sekolah dalam merencanakan penggunaan dana BOS, masih ada sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan rencana penggunaan dana BOS, audit Bawasda menemukan bahwa banyak sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan pengeluaran, berdasarkan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa ada beberapa sekolah yang laporan pertanggungjawaban dana BOS ditolak dan dikembalikan, hal ini disebabkan oleh sistem pelaporannya yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Untuk menghindari ketidakefektifan penggunaan dana BOS, maka diperlukan adanya kemampuan dari kepala sekolah sebagai manajer dalam proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan bidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah membutuhkan manajemen keuangan, karena merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan.

Proses manajemen BOS di sekolah meliputi perencanaan dalam hal pendanaan disebut Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), perencanaan yang telah disusun dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi. Penyusunan alokasi anggaran memang menyesuaikan dengan keadaan sekolah dan mengacu pada petunjuk teknis yang ada. Untuk menjaga agar jangan sampai

terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS diperlukan laporan administrasi keuangan. Perwujudan dari manajemen adalah pengelolaan dana BOS agar efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pasuruan tidak semua dijadikan sebagai subyek penelitian. Dalam penelitian ini hanya diambil dua Sekolah yaitu SMPN 1 Tutur dan SMPN 1 Purwosari. Pemilihan lokasi penelitian ini karena kedua sekolah tersebut merupakan penerima dana Bantuan Operasional Sekolah . Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 3 Desember 2022 , menunjukkan bahwa pihak sekolah membuat skala prioritas dalam mengalokasikan dana program BOS yaitu: 1) peningkatan sarana belajar melalui pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk di koleksi di perpustakaan, 2) pendanaan kegiatan belajar mengajar melalui pendanaan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, ujian sekolah, analisis, remedial dan pengayaan, dan laporan hasil belajar murid , 3) pendanaan akitivitas kemurid an seperti program kegiatan ekstrakurikuler yaitu olah raga, kesenian, keagamaan/rohis, karya ilmiah remaja, pramuka, paskibra, palang merah remaja, dan lain-lain. Berdasarkan kebijakan alokasi program dana BOS tersebut, kegiatan belajar dan mengajar di kedua Sekolah Menengah Pertama tersebut dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul : “Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMPN 1 Tutur Dan SMPN 1 Purwosari”

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, fokus masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 1 Tukur dan di SMPN 1 Purwosari?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 1 Tukur dan SMPN 1 Purwosari ?

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 1 Tukur dan di SMPN 1 Purwosari.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 1 Tukur dan SMPN 1 Purwosari.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan

manajemen keuangan dalam memberikan pengetahuan tentang peningkatan mutu pendidikan.

2. Segi Praktis

- a. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan tentang manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Menengah Pertama dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Bagi pengelola program BOS, sebagai bahan evaluasi tentang pelaksanaan dan manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah SMPN 1 Tuter dan SMPN 1 Purwosari
- c. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan tentang manajemen dana BOS yang baik.
- d. Bagi peneliti lanjutan, sebagai bahan informasi tentang manajemen dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan.